



## **Analisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif terhadap Peningkatan Kompetensi Siswa dan Indeks Pendidikan di Kabupaten Garut**

**Damay Rusli**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIP Tasikmalaya

hdamayrusli@gmail.com

### **Abstrak**

Pendidikan inklusi merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, mendapatkan akses pendidikan yang adil dan berkualitas. Kebijakan ini menekankan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung keberagaman dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak implementasi kebijakan pendidikan inklusif terhadap peningkatan kompetensi siswa dan Indeks Pendidikan (IPM) di Kabupaten Garut. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi, penelitian ini mengidentifikasi hubungan antara penerapan kebijakan inklusif dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi siswa dan IPM. Koefisien regresi sebesar 0,491 untuk kompetensi siswa dan 0,481 untuk IPM menunjukkan bahwa semakin baik penerapan kebijakan, semakin tinggi pula tingkat kompetensi siswa dan IPM. Selain itu, hasil uji statistik menunjukkan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $12,572 > 1,977$  untuk kompetensi siswa dan  $11,765 > 1,977$  untuk IPM), dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan inklusif memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut. Hal ini menegaskan pentingnya dukungan yang berkelanjutan dalam bentuk pelatihan guru, peningkatan fasilitas, dan pengembangan strategi pembelajaran yang inklusif untuk memastikan keberhasilan pendidikan bagi semua siswa.

**Kata Kunci:** Indeks Pendidikan, Kabupaten Garut, Kebijakan Inklusif, Kompetensi Siswa.

### **1. Pendahuluan**

Pendidikan inklusi adalah kebijakan yang bertujuan untuk menjamin semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas tinggi. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif diharapkan dapat meningkatkan kompetensi siswa secara keseluruhan dan berkontribusi terhadap peningkatan indeks pendidikan suatu daerah, termasuk di Kabupaten Garut.

Pendidikan inklusif merupakan kebijakan yang dirancang untuk memperoleh akses pendidikan yang setara dan berkualitas. Kebijakan ini mengedepankan prinsip keadilan dalam sistem pendidikan, dengan adanya kebijakan ini, setiap anak diharapkan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun emosional.

Implementasi pendidikan inklusif juga memiliki dampak yang luas terhadap kualitas pendidikan di suatu daerah. Ketika setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya, maka kualitas pembelajaran secara keseluruhan akan meningkat (Guimarães et al., 2022). Selain itu, pendekatan ini turut berkontribusi terhadap IPM, khususnya dalam aspek pendidikan. Di Kabupaten Garut, penerapan pendidikan inklusif dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan capaian pendidikan dengan memperhatikan keberagaman peserta didik (Ferri et al., 2023).

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai tantangan (Fadhilah Putri, 2021). Kesiapan sekolah dalam menyediakan lingkungan pembelajaran yang inklusif belum optimal, terutama dalam hal ketersediaan tenaga pendidik terlatih, sarana dan prasarana pendukung, serta pendampingan dari orang tua dan masyarakat (Karim Amrullah, 2023). Masih terdapat persepsi bahwa pendidikan inklusif hanya diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus, padahal konsep ini justru bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang dapat mengakomodasi keberagaman siswa secara menyeluruh (Hunt, 2021).

Indeks Pendidikan Kabupaten Garut pada tahun 2022 diukur sebesar 59,85. Indikator ini merupakan salah satu komponen dari indikator Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur hasil pembangunan pendidikan. Indeks Pendidikan dihitung dengan menggunakan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Data statistik sementara untuk tahun 2023 menunjukkan bahwa RLS di Kabupaten Garut adalah 7,84 tahun, dengan harapan lama sekolah 12,16 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata lama sekolah masih lebih rendah dari yang diproyeksikan. Namun demikian, persentase partisipasi murni untuk anak-anak sekolah dasar adalah 97,18%, sedangkan tingkat partisipasi sekolah menengah pertama adalah 83,28% (BPS, 2023).

Kabupaten Garut telah menerapkan kebijakan pendidikan inklusif di beberapa sekolah. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang diamanatkan dengan realitas di lapangan. Keterbatasan tenaga pendidik dengan keahlian dalam menangani siswa berkebutuhan khusus, kurangnya sarana pendukung, serta tingkat pemahaman orang tua terhadap pendidikan inklusif menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan ini. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Garut memengaruhi kompetensi siswa dan indeks pendidikan.

Dalam konteks implementasi kebijakan, teori Edward III, (1984) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kejelasan komunikasi mengenai kebijakan pendidikan inklusif sangat penting agar guru dan orang tua memahami serta mendukung kebijakan ini. Ketersediaan sumber daya seperti tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas yang memadai, serta dukungan pendanaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Disposisi pelaksana, dalam hal ini sikap dan komitmen guru serta orang tua, juga turut menentukan efektivitas kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas dan koordinasi antar lembaga terkait diperlukan agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif.

Sementara itu, kompetensi siswa dalam penelitian ini merujuk pada teori Spencer & Spencer, (1993) yang mencakup tiga aspek utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan konsep diri. Kompetensi yang berkembang dalam lingkungan inklusif berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Selain itu, indeks pendidikan suatu daerah juga menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan sistem pendidikan. UNESCO (2021) mengembangkan konsep Education Index, yang mengukur capaian pendidikan berdasarkan APS, RLS, serta tingkat literasi penduduk. Indeks pendidikan ini menjadi salah satu faktor penting dalam melihat sejauh mana sistem pendidikan suatu daerah mampu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pembelajaran bagi seluruh siswa.

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan utama. Pertama, strategi pemerataan pendidikan yang bertujuan memastikan semua siswa mendapatkan hak belajar yang sama tanpa diskriminasi. Kedua, penelitian empiris mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif di tingkat daerah masih terbatas, sementara sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek normatif atau kebijakan makro. Ketiga, dampak kebijakan pendidikan inklusif terhadap kompetensi siswa dan indeks pendidikan masih belum terukur secara sistematis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan pendidikan inklusif, khususnya dalam aspek komunikasi kebijakan, penyediaan sumber daya, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta peran orang tua dalam mendukung lingkungan belajar yang lebih inklusif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas implementasi kebijakan pendidikan inklusif dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Studi yang dilakukan oleh (Atika, 2024) menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan inklusi sangat bergantung pada persiapan sekolah dalam menyediakan lingkungan belajar yang adaptif dan dukungan dari tenaga pendidik. Selain itu, Mastrodonato, (2021) juga menekankan bahwa pendidikan inklusif yang diterapkan secara efektif dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah, kualitas pembelajaran, serta kesetaraan akses pendidikan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan indeks pendidikan suatu wilayah.

## 2. Metodologi

Metodologi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yaitu dengan menganalisis hasil uji hipotesis yang telah ditetapkan yang bersumber dari data statistik yang diolah. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Penulis bermaksud menggunakan metode ini untuk mengumpulkan dan mencari gambaran data mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian, penulis akan mengumpulkan data deskriptif untuk membantu dalam pembuatan makalah penelitian. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dievaluasi sesuai dengan teori yang sedang dikaji sehingga kesimpulan dari masalah yang diteliti. Metodologi penelitian ini mengacu kepada variabel penelitian yang satu sama lain saling terhubung dengan dimensi dan indikator sesuai dengan teori yang ditetapkan. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan tabel operasional penelitian.

**Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan	1. Komunikasi	Sosialisasi kebijakan kepada guru dan orang tua Kejelasan informasi terkait kebijakan
	2. Sumber Daya	Ketersediaan tenaga pendidik inklusif

Variabel	Dimensi	Indikator
Pendidikan Inklusif (X)	3. Disposisi/Sikap Pelaksana	Ketersediaan sarana dan prasarana
		Pendanaan untuk pendidikan inklusif
	4. Struktur Birokrasi	Komitmen guru dan orang tua dalam mendukung pendidikan inklusif
		Sikap penerimaan terhadap siswa berkebutuhan khusus
Kompetensi Siswa (Y1)	1. Pengetahuan	Kejelasan regulasi dan prosedur Pelaksanaan
		Koordinasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, sekolah, orang tua)
	2. Keterampilan	Pemahaman materi
		Berpikir kritis
Indeks Pendidikan (Y2)	3. Konsep Diri	Kemampuan menyelesaikan tugas akademik
		Kemampuan sosial dalam lingkungan inklusif
	1. Partisipasi Siswa	Kepercayaan diri dalam belajar
		Motivasi untuk berpartisipasi dalam pembelajaran
	2. Prestasi Akademik	Tingkat kehadiran siswa
		Keikutsertaan dalam kegiatan akademik dan ekstrakurikuler
	3. Aksesibilitas Pendidikan	Nilai ujian siswa
		Peningkatan hasil belajar dari waktu ke waktu

Penelitian ini mengambil responden dari guru dan orang tua siswa di Kabupaten Garut, yaitu berjumlah 144 orang. Alasan peneliti memilih responden karena peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu mengambil objek penelitian digeneralisasi dari populasi berdasarkan karakteristik tertentu. Karena, jumlah keseluruhan guru dan orang tua siswa di Kabupaten Garut tidak diketahui maka peneliti menggunakan aplikasi G\*Power untuk mendapatkan sampel

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Hasil Penelitian

Setelah melaksanakan pengolahan dengan perhitungan data statistika, langkah pertama dalam mencari nilai korelasi adalah menilai ada atau tidaknya hubungan dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih.

**Tabel 2. Hasil Penelitian**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.726 <sup>a</sup>	0.527	0.523	2.807
2	.703 <sup>a</sup>	0.494	0.49	2.94
a. Predictors: (Constant), Kebijakan_Inklusif				
b. Dependent Variable: Kompetensi, Peningkatan_Ip				

Nilai R untuk model pertama adalah 0,726 dan untuk model kedua adalah 0,703. Artinya, ada hubungan positif antara variabel bebas dan variabel terikat, dan hubungan tersebut cukup kuat. Secara umum, semakin mendekati 1, semakin kuat hubungan antara dua variabel yang dianalisis.

Nilai *R Square* untuk model pertama adalah 0,527, dan untuk model kedua adalah 0,494. Ini menunjukkan bahwa sekitar 52,7% dari variasi dalam variabel terikat (Kompetensi, Peningkatan

IP) dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam model pertama, dan sekitar 49,4% dapat dijelaskan pada model kedua.

**Tabel 3. Hasil Penelitian**

Hipotesis	Korelasi	Thitung	Ttabel	Nilai Sig	Hasil
(X-Y1)	0,726	1.977	12,572	0,000	Signifikan
(X-Y2)	0,703	1.977	11,765	0,000	Signifikan

### 3.2 Pembahasan

Pendidikan inklusif merupakan kebijakan yang sangat penting dalam mengakomodasi kebutuhan pendidikan bagi semua siswa, termasuk siswa dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan khusus. Tanpa adanya kebijakan yang jelas dan terarah, lembaga pendidikan akan kesulitan dalam mengelola pembelajaran yang dapat mencakup seluruh siswa, yang berpotensi menyebabkan ketimpangan dalam proses pendidikan (Dey, 2024). Oleh karena itu, implementasi kebijakan pendidikan inklusif menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap siswa, tanpa terkecuali, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan potensi.

Dalam konteks Kabupaten Garut, implementasi kebijakan pendidikan inklusif memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kompetensi siswa. Kebijakan ini memungkinkan para pendidik untuk merancang metode pembelajaran yang lebih beragam dan dapat mengakomodasi perbedaan kemampuan serta kebutuhan peserta didik. Dengan adanya kebijakan tersebut, pendidik memiliki panduan yang jelas dalam melaksanakan proses pembelajaran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa.

Selain itu, kebijakan pendidikan inklusif juga berpengaruh terhadap indeks pendidikan di Kabupaten Garut. Peningkatan kompetensi siswa yang tercapai melalui implementasi kebijakan ini berdampak pada hasil belajar individual siswa secara keseluruhan. Dengan adanya sistem pendidikan yang lebih inklusif, diharapkan dapat tercipta lingkungan pembelajaran yang lebih adil dan merata, yang akhirnya berkontribusi pada peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Garut.

Dampak positif dari kebijakan pendidikan inklusif ini tidak hanya terlihat pada aspek kognitif siswa, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial mereka (Urvashi, 2021). Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Garut menjadi langkah strategis dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan di daerah tersebut.

#### a. Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif (X) terhadap Kompetensi Siswa (Y1)

Secara data statistik dari hasil pengolahan data awal pula mencari perbandingan hasil thitung dan ttabel. Untuk variabel ini menghasilkan nilai ttabel yaitu thitung = 7,571 > ttabel = 2.000. Lebih lanjut, nilai tersebut diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 T \text{ Tabel} &= t(a/2:n-k-1) \\
 a &= 5\% = t(0.05/2:144-1-1) \\
 &= 0.025:142 \text{ (t Tabel)} \\
 T \text{ tabel} &= 1.977
 \end{aligned}$$

$$X2 = 12,572$$

**Tabel 3. Hasil Penelitian**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Kebijakan Inklusif	.491	.039	.726	12.572	.000

Berdasarkan hasil analisis regresi, ditemukan bahwa kebijakan inklusif memiliki pengaruh yang positif dan cukup besar dalam meningkatkan kompetensi siswa. Hal ini ditunjukkan oleh nilai sebesar 0.491, yang berarti setiap peningkatan dalam implementasi Kebijakan Inklusif akan meningkatkan kompetensi siswa sebesar 0.491 satuan. Selain itu, nilai t-hitung sebesar 12.572 lebih besar daripada t-tabel sebesar 1.977, serta nilai signifikansi 0.000 yang lebih kecil dari 0.05, menunjukkan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Nilai koefisien Beta sebesar 0.726 juga mengindikasikan bahwa Kebijakan Inklusif memiliki pengaruh yang kuat terhadap kompetensi siswa. Dengan demikian, semakin baik implementasi Kebijakan Inklusif, maka semakin tinggi pula kompetensi siswa. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan pendidikan inklusif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan perkembangan kemampuan siswa.

Selaras dengan hasil penelitian diperlukannya sekolah mensosialisasikan ide pendidikan inklusif kepada para pengajar, siswa, dan orang tua, serta masyarakat luas, yang lebih terukur dan intens khususnya kepada orang tua siswa (Rahayu, 2024). Lebih lanjut (Khairunnis et al., 2024) Pemerintah sebagai pengelola implementasi kebijakan pendidikan inklusi harus memiliki komitmen baik dari segi tenaga pendidik, kurikulum yang jelas, kelengkapan fasilitas, serta keterbukaan, agar tidak ada praktik yang gagal memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan yang diharapkan orang tua.

#### **b. Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif (X) Terhadap Peningkatan Indeks Pendidikan (Y2)**

Secara data statistik dari hasil pengolahan data awal pula mencari perbandingan hasil thitung dan ttabel. Untuk variabel ini menghasilkan nilai ttabel yaitu thitung = 1,977 > ttabel = 11,765. Lebih lanjut, nilai tersebut diperoleh melalui perhitungan.

**Tabel 4. Hasil Penelitian**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.346	1.475	4.302	.000
	Kebijakan Inklusif	.481	.041	.703	11.765
					.000

Temuan dari analisis regresi menunjukkan bahwa Kebijakan Inklusif memiliki pengaruh positif dan substansial dalam meningkatkan indeks pendidikan di Kabupaten Garut. Nilai koefisien regresi sebesar 0,481 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pada implementasi Kebijakan Inklusif, indeks pendidikan meningkat sebesar 0,481 satuan. Lebih lanjut, nilai t-hitung sebesar 11,765 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,977 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari

ambang batas 0,05 menunjukkan bahwa pengaruhnya signifikan secara statistik. Nilai Beta sebesar 0,703 menunjukkan bahwa Kebijakan Inklusif berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam model ini. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa semakin baik Kebijakan Inklusif diimplementasikan, maka semakin tinggi pula indeks pendidikan di Kabupaten Garut. Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan pendidikan inklusif dalam mengembangkan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh. Dengan kata lain, pendidikan berkontribusi secara nyata dalam menentukan tingkat pembangunan manusia di Indonesia, karena peningkatan akses dan kualitas pendidikan dapat berdampak langsung pada aspek kesehatan, kesejahteraan ekonomi, serta peluang kerja yang lebih baik (Rosyid et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki kontribusi terhadap pendidikan secara nyata dalam menentukan tingkat pembangunan manusia di Indonesia, karena peningkatan akses dan kualitas pendidikan dapat berdampak langsung pada aspek kesehatan, kesejahteraan ekonomi, serta peluang kerja yang lebih baik (Rueangdej & Nomnian, 2021).

Meskipun kebijakan pendidikan inklusif memiliki potensi besar dalam meningkatkan kompetensi siswa, pada kenyataannya tingkat pendidikan di Garut masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat pendidikan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten dalam menerapkan metode inklusif, serta minimnya fasilitas pendukung pembelajaran. Selain itu, faktor sosial-ekonomi masyarakat juga berperan besar dalam menentukan partisipasi dan keberhasilan siswa dalam pendidikan.

#### **4. Kesimpulan**

Atas dasar hasil uji hipotesis dari pengolahan data statistik dan pembahasan secara teoritis, dapat disimpulkan secara deskriptif mengenai pengaruh Kebijakan Inklusif terhadap kompetensi siswa dan indeks pendidikan di Kabupaten Garut. Implementasi Kebijakan Inklusif terbukti memiliki dampak positif dan signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, baik dalam aspek kompetensi individu maupun pemerataan pendidikan secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh hasil perhitungan statistik yang menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel, serta diperkuat oleh pembahasan teoritis yang menegaskan pentingnya inklusivitas dalam sistem pendidikan. Dengan demikian, semakin optimal penerapan Kebijakan Inklusif, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan kompetensi siswa dan indeks pendidikan di Kabupaten Garut.

#### **Daftar Pustaka**

##### **I. Buku**

- Iskandar. J. 2018. *Metoda Penelitian*. Bandung. Puspaga.
- Amrullah. Z. A, 2019. *Manajemen Belajar dan Pembelajaran di Sekolah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Winarno. B. 2021. *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.



## II. Jurnal dan Penelitian Ilmiah

- Atika, A. (2024). Praktik Pendidikan Inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 9(1), 45–54. <https://doi.org/10.30631/91.45-54>
- BPS. (2023). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. *Badan Pusat Statistik*. <https://jabar.bps.go.id/indicator/23/83/1/jumlah-penduduk-miskin.html>
- Dey, S. (2024). Asian International Students' Barriers to Reporting Sexual Harassment Incidents. *Journal of International Students*, 14(4), 902–919. <https://doi.org/10.32674/jis.v14i4.6711>
- Edward III. (1984). Model Implementasi kebijakan George Edward III - FREE WRITTING IN THE WALL. <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>
- Fadhilah Putri, Z. (2021). the Principal'S Leadership Strategy in Implementing Inclusive Education Policies in Smp Negeri 2 Yogyakarta. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 4(3), 932–953. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i3.74>
- Hunt, P. F. (2021). Inclusive education: The case for early identification and early intervention in assistive technology. *Assistive Technology*, 33(sup1), 94–101. <https://doi.org/10.1080/10400435.2021.1974122>
- Karim Amrullah, A. (2023). Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan pada Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 5 Brebes. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(4), 319–336. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i4.1001>
- Khairunnisa Fitrah Umi Kaltsum, Warman, & Laili Komariyah. (2024). Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri Kota Sangatta dan Solusi untuk Mengatasinya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 127–137. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i2.1874>
- Mastrolonardo, L. (2021). Sustainable mobility and beauty of public space. *Vitruvio*, 6(2), 42–55. <https://doi.org/10.4995/vitruvio-ijats.2021.16560>
- Rahayu, A. M. S. (2024). Manajemen Boarding School Dalam Pengembangan Karakter Siswa Mts Attaqwa Putra BekaSI. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rosyid, A., Damayanti, E., Rohani, S. T., Shabila, S., Dharmani, I. G. A. A. N., Sari, P. Z., Sari, N., & Prastoeti, R. (2025). Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran terhadap IPM di Indonesia Periode 2021-2023. *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial*, 3(2), 1–13.
- Urvashi, S. (2021). Reimagining Crises in the Indian University. *Human Arenas*, 4(3), 430–439. <https://doi.org/10.1007/s42087-020-00160-4>
- Spencer, L.M. and Spencer, S.M. (1993) Competence at Work: Models for Superior Performance. *John Wiley & Sons*, New York.
- UNESCO. (2021). Global Education Monitoring Report 2021/2: Non-state actors in education: Who chooses? Who loses?. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. [https://unesdoc.unesco.org/ark%3A/48223/pf0000380076\\_ind](https://unesdoc.unesco.org/ark%3A/48223/pf0000380076_ind)

## III. Dokumen

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.
- BPS. (2023). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. *Badan Pusat Statistik*. <https://jabar.bps.go.id/indicator/23/83/1/jumlah-penduduk-miskin.html>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Indeks Pembangunan Kebudayaan: Dimensi Pendidikan*. <https://ipk.kemdikbud.go.id/dimensi/pendidikan>